



Jawa Tengah, 29 Mei 2022

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Ir. Joko Widodo
Presiden RI.

Hal : Permohonan Audiensi Terkait Penyelamatan Ekosistem Daerah Aliran Sungai Serayu dan Waduk Mrica (Unit Pembangkit PLTA PB Soedirman).

Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi,

Kami selaku kepala daerah kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap secara seksama selalu mencoba mengikuti pandangan dan arahan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi tantangan global yang tengah kita hadapi bersama. Tantangan yang harus mendapat perhatian itu terkait dengan perubahan iklim, krisis energi, dan kerusakan alam yang sangat beresiko bagi kehidupan kita pada saat ini dan masa mendatang. Kami bersepakat dengan pandangan Presiden yang disampaikan di berbagai forum nasional maupun internasional bahwa kita harus bersama-sama menjaga dan meningkatkan kualitas ekosistem tempat kehidupan kita. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan kolaboratif untuk menjaga kelestarian lingkungan harus dilakukan bersama dengan membangun koordinasi erat, baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Dalam upaya menjaga ekosistem, salah satu masalah yang menjadi perhatian utama kami terkait dengan penyelamatan perairan darat. Ini meliputi penyelamatan sumber air pada sungai, danau dan mata air. Sebagai kepala daerah dengan wilayah yang dilintasi Sungai Serayu dengan anak-anak sungainya, kami menyadari sepenuhnya bahwa keseluruhan sumber air sangat penting bagi kehidupan kami. Sungai Serayu yang membentang dari timur laut ke barat daya sejauh 181 kilo meter dan melintasi lima kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap, adalah urat nadi kehidupan warga kami yang kini telah berjumlah 6.7 juta (BPS 2021). Sungai ini sejak lama telah menjadi bagian penting kehidupan kami yang berfungsi sebagai sumber air irigasi pertanian dan perikanan, sumber air minum, alat transportasi dan sanitasi, dan juga sebagai penopang ketahanan ekologis tempat hidupnya habitat keaneka-ragaman hayati. Sungai Serayu tak hanya menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi, namun juga sebagai penopang kehidupan masyarakat kami.

Sejak tahun 1989, keberadaan Sungai Serayu menjadi semakin vital bagi kami dengan telah dibangunnya Bendungan Panglima Besar Sudirman (juga dikenal sebagai Waduk Mrica) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Dengan luas genangan air 8.258.253 m², Waduk Mrica telah berfungsi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sumber energi terbarukan. Kemampuan daya yang dihasilkan sebesar 180,93 MW. Selain itu, waduk ini juga telah menjadi daerah tangkapan air (DTA) yang memiliki luas area 957 km² (kapasitas awal 148,29 juta m³). Kini, Waduk Mrica tak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, namun keindahan alam lingkungan alamnya telah menjadikan waduk ini sebagai destinasi wisata bagi banyak warga sekitar waduk dan warga dari berbagai daerah.

Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi,

Di tengah peran penting Sungai Serayu sebagaimana telah kami gambarkan, sungai ini sejatinya tengah mengalami degradasi serius. Erosi yang sangat tinggi di sepanjang DAS Serayu, khususnya di daerah hulu sungai, telah mengakibatkan proses pendangkalan serius pada Waduk Mrica. Volume sedimen yang mengendap di Waduk Mrica sangat besar sehingga tak saja mengancam eksistensi waduk, namun juga berpotensi menyebabkan bencana besar. Menurut kajian PT. Indonesia Power, pada awal pengoperasian waduk, tingkat sedimentasi diperkirakan mencapai 2,4 juta m³ tiap tahunnya. Namun, beberapa tahun terakhir ini angka itu cenderung meningkat, jauh melebihi tingkat sedimentasi yang diperkirakan sebelumnya, yakni berturut-turut 4,4 juta m³ (2016), 4,06 juta m³ (2017), 2,2 juta m³ (2018), 2,9 juta m³ (2019), 2,7 juta m³ (2020) dan 6,6 juta m³ (2021). Semula, dengan perkiraan tingkat sedimentasi 2,4 juta m³/tahun, waduk diperkirakan dapat beroperasi selama 60 tahun sejak beroperasinya waduk di tahun 1989, yakni hingga 2049. Namun, dengan adanya peningkatan sedimentasi ini, eksistensi Waduk Mrican menjadi terancam. Bahkan bila tidak dilakukan penanganan segera, eksistensi waduk tidak saja hilangnya, namun juga berpotensi terjadinya bencana besar karena jebolnya Waduk Mrica. Bila ini terjadi, tak dapat dibayangkan berapa kerugian yang akan terjadi akibat banjir bandang lumpur yang menerjang DAS Serayu. Dapat diperkirakan ribuan rumah akan terhempas, ratusan ribu hektar sawah dan perkampungan akan terendam, PDAM akan berhenti beroperasi, dan bahkan yang paling mengkhawatirkan, fasilitas transportasi umum, termasuk rel kereta api, akan terhenti karena tertimbun lumpur. Bila ini terjadi, tentu derap kehidupan ekonomi yang menghidupi 6,7 juta warga di wilayah ini akan lumpuh total.

Kami memahami, untuk mengurangi besarnya volume endapan sedimentasi pada waduk, PT. Indonesia Power secara rutin telah melakukan penggelontoran lumpur (*flushing*). Ini dilakukan secara bertahap dengan skala terukur. Namun, menurut studi Fitcher (2017), bila *flushing* dilakukan secara normal sebagaimana dilakukan selama ini (tanpa ada upaya lain lebih besar untuk mencegah tingginya sedimentasi), kapasitas reservoir Waduk Mrica diperkirakan secara total akan tertutup lumpur pada 2025, dan tentu akibatnya PLTA ini tak lagi dapat beroperasi. Bila ini terjadi, tentu akan sangat disayangkan karena PLTA Waduk Mrica merupakan sumber energi terbarukan yang akhir-akhir ini oleh Presiden justru perlu didorong untuk dikembangkan. Oleh karena itu, kami menyadari, upaya penanganan sedimen lebih serius harus dilakukan. Pencegahan erosi yang dapat memicu bencana besar di sepanjang DAS Serayu harus dilakukan. Upaya kolaboratif sangat diperlukan.

Namun, belum juga tekad ini dapat kami dilakukan, bencana pada DAS Serayu telah terjadi pada Maret dan April 2022, saat gelontoran lumpur pada Sungai Serayu terjadi, jauh dari volume biasanya. Bagi kami, ini jelas merupakan peringatan dini. Kronologi kejadian tersebut menurut penjelasan PT. Indonesia Power adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 31 Maret 2022, pengelola Waduk Mrica (PT. Indonesia Power) melaksanakan tugas rutin Pembukaan Sistem Pembuangan Sedimen/DDC (*Draw Down Culvert*) sesuai SOP (*Standard Operation Procedure*) yang berlaku. Namun saat dilakukan DDC kali ini, nampaknya terjadi longsor pada endapan sedimen di dalam waduk. Keadaan ini tentu dapat membahayakan beroperasinya waduk dan bahkan dapat menimbulkan jebolnya waduk.
2. Sebagai langkah pengamanan dari kondisi ini, pada 6 April 2022 dilakukan kembali pembukaan DDC untuk mencegah tertutupnya DDC oleh sedimen yang longsor. Namun karena adanya longsor endapan sedimen pada waduk, DDC harus dilakukan dalam jangka waktu lama demi penyelamatan PLTA dan ancaman jebolnya waduk.
3. Namun, dampak dari pembukaan DDC yang berlangsung lama ini, air Sungai Serayu menjadi keruh, irigasi dan pasokan air bersih terganggu, dan kehidupan biota sungai Serayu dan keseluruhan ekosistem terganggu. Atas kejadian ini, keresahan di kalangan masyarakat muncul. Potensi konflik merebak.

PT. Indonesia Power telah berupaya melakukan tindakan pengamanan sesuai SOP. Atas kejadian ini, pihak PT. Indonesia Power mencoba memberi penjelasan kepada segenap *stakeholders* yang terkena dampak dari peristiwa ini. Beberapa kali pertemuan dilakukan dengan segenap jajaran pemerintah daerah dan masyarakat di lima kabupaten terdampak, yakni kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga dan Cilacap. Ketegangan yang sebelumnya terjadi mereda dengan dipahaminya masalah yang terjadi sebenarnya. Namun, dengan terjadinya peristiwa ini, tumbuh kesadaran bersama bahwa langkah-langkah mendasar yang harus dilakukan secara serius harus segera dilakukan. Langkah substansial harus dilakukan agar bencana lebih besar tidak terjadi.

Dalam kaitan inilah kami mencoba memberanikan diri menulis surat kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan saran dan bantuan agar potensi bencana lebih besar dapat dihindari. Kami melihat keadaan saat ini sangat kritis setelah melihat hasil kajian PT. Indonesia Power bahwa volume endapan sedimentasi di Waduk Mrica pada 2021 ini telah mencapai 87,87% dari keseluruhan volume waduk. Upaya pengerukan (*dredging*) dan pencegahan erosi secara besar-besaran di sepanjang DASi Serayu harus segera dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, dari pemerintah daerah, pusat, perusahaan dan juga masyarakat. Dalam kaitan ini, kami sangat sejalan dengan pandangan Presiden yang dikemukakan pada pembukaan *The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022* di Bali baru-baru ini bahwa saat ini upaya "membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim" harus dilakukan. Demikian juga "perlindungan kepada masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah beresiko tinggi" harus mendapat prioritas (<https://bnpb.go.id>). Sebagai langkah awal, saat ini kami telah mengidentifikasi 563 desa yang akan melibatkan dalam membangun gerakan penyelamatan DAS Serayu. Bila sekiranya berkenan, Bapak Presiden dapat melihat lokasi desa-desa tersebut pada link serayunetwork.net.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya penanganan masalah yang harus segera diatasi, kami memohon kepada Bapak Presiden agar kiranya Bapak dapat memberi waktu kepada kami untuk beraudiensi guna membahas masalah ini. Besar harapan kami agar kiranya permohonan ini dapat dikabulkan. Atas perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini, kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,

Bupati
Wonosobo
Afif Nur Hidayat

Pj. Bupati Banjarnegara
Tri Harso
Widrahmanto

Bupati
Purbalingga
Dyah Hayuning
Pratiwi

Bupati Banyumas
Achmad Husein

Bupati Cilacap
Tatto Suwanto Pamuji